

PELAKSANAAN MODEL GURU KUNJUNG DI DAERAH TERPENCIL

Reddy Siram

Universitas Palangka Raya, Kampus Tunjung Nyaho Jl. Yos Sudarso Palangka Raya
e-mail: reddysiram@yahoo.com

Abstract: The Implementation of Visiting Teachers Model in Remote Areas. This research project describes the planning, socialization, implementation of visiting teachers model. This multi-site research was carried out within the contexts of 3 primary schools in the Regency of Murung Raya. Participant observations, in-depth interviews, and document analysis (documentation) were used to collect the data. The subjects as sources of the data include teachers, students, administrators, authority (in societal conventions), school principals, school superintendents, tutors, and skilled workers. The results show that the planning of the primary schools has been appropriate with the conditions: remote, dispersed, and isolated. The implementation has been supported by various stakeholders.

Keywords: visiting teachers, isolated villages

Abstrak: Pelaksanaan Model Guru Kunjung di Daerah Terpencil. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan model guru kunjung. Penelitian multisitus ini dilaksanakan di 3 SD Kunjung di Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data adalah guru, siswa, pejabat, tokoh adat, Kepala SDN Induk, Penilik, guru SD, tutor dan tenaga terampil dari masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan SD Kunjung sesuai dengan persyaratan terpencil, terpencar dan hambatan geografis. Perencanaan memerhatikan kebutuhan masyarakat dan melibatkan berbagai pihak. Sosialisasi dilakukan oleh masyarakat, perusahaan, perangkat desa, kepala SD Induk-Basis, guru dan komite, yang memotivasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk penguatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan. SD kunjung dikepalai oleh Kepala SD Induk. Mereka dibantu oleh guru, tutor dan tenaga terampil, kios belajar, guru kunjung, dan karyawan perusahaan. Pemerintah desa, perusahaan, tokoh adat dan masyarakat membangun kios belajar dengan melibatkan berbagai pihak.

Kata kunci: guru kunjung, daerah terpencil

Pendidikan merupakan hal penting dan mendasar. Melalui pendidikan, usaha-usaha memerjuangkan kehidupan rakyat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan seluruh bangsa dapat diwujudkan secara memadai. Tujuan pemerataan kesempatan pendidikan tidak dapat dicapai dengan cara-cara yang konvensional, terutama karena adanya hambatan geografis dan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, perlu dicari bentuk tindakan alternatif kebijakan pemerataan kesempatan pendidikan dasar di daerah terpencil.

Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, suku dan jenis kelamin wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar merupakan sebuah

pendidikan umum selama enam tahun sampai dengan sembilan tahun. Pendidikan dasar merupakan *educational foundation* dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi seorang warga negara yang beriman dan bertaqwa, mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang warga negara, dan memiliki keterampilan dasar bagi semua pekerjaan di masyarakat (Adler, 1982).

Dalam kaitan dengan pendidikan dasar, sejak tahun 1970 pemerintah secara khusus telah meningkatkan pembinaan pada pendidikan sekolah dasar. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) pada bulan November 1973 (Beeby, 1979). Menurut Suryadi & Tilaar (1993), sejak dikeluarkannya Inpres 1973/1974 sampai tahun 1992, kurang lebih

5,117 triliun rupiah telah diinvestasikan untuk pengembangan sekolah dasar. Dengan dana tersebut, tidak kurang dari 147,5 ribu unit gedung SD dan ruang kelas telah dibangun. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan kuantitatif pengembangan pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

Kalimantan Tengah berpenduduk 2,2 juta pada tahun 2008 dengan kepadatan penduduk kurang dari 15 orang perkilometer persegi, memiliki kondisi geografis seluas 1,5 dari pulau Jawa atau 153.800 km². Pola penyebaran penduduk tidak merata dan banyak berbentuk kelompok-kelompok kecil dan tinggal dalam kantong-kantong yang biasa disebut *dukuh*. Apa yang disebut kampung atau desa di Kalimantan Tengah hanyalah merupakan suatu pusat pemukiman penduduk dengan jumlah sekitar 300 orang. Dari sekitar 1.300 kampung atau desa terdapat lebih dari setengahnya yang penduduknya berjumlah antara 300 sampai 500 orang. Dari kondisi tersebut dapat diperkirakan terdapat 20% atau antara 60 sampai 100 anak usia sekolah setiap kampung, bahkan ada suatu kampung yang jumlah penduduknya 150 orang dengan anak usia sekolah dasar 30 orang. Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa di Kalimantan Tengah masih banyak terdapat daerah terpencil. Masih terdapat 1.081 orang anak usia 7 sampai 12 tahun yang belum tertampung pada Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Tengah, 1991).

Sekolah dasar konvensional biasanya memerlukan sekurang-kurangnya sepuluh siswa dengan seorang guru untuk setiap kelas. Perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa adalah satu berbanding 28 (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 pasal 5). Jika ketentuan itu diberlakukan, maka sekitar seperdua kampung-kampung di Kalimantan Tengah dapat dinyatakan tidak layak mendapat pelayanan sebuah sekolah dasar lengkap. Hal ini melatar-belakangi pengembangan Sekolah Kecil sebagai pengganti sistem pengajaran klasikal konvensional.

Penyebaran penduduk sedemikian itu dipersulit lagi oleh kenyataan bahwa sebagian penduduk mempunyai tingkat mobilitas tinggi yang berkaitan dengan kesempatan mencari nafkah. Hal ini dikarenakan tingkat kesuburan tanah yang rendah dan tidak meratanya persebaran tanah mineral, yang umumnya berupa daratan tanggul sungai dengan lebar hanya beberapa ratus meter. Penduduk terpaksa harus mengerjakan lahan yang kecil-kecil dan berjauhan satu sama lainnya, sehingga sering dijuluki sebagai peladang berpindah. Pola mobilitas penduduk seperti itu disebabkan oleh kegiatan mencari nafkah yang berpusat pada kegiatan pertanian atau perdagangan. Oleh karena mobilitas itu sudah berpola, maka mudah untuk mengetahui lokasi sebagian penduduk yang meninggalkan kampungnya

pada suatu waktu atau masa tertentu. Mereka berpindah-pindah dengan membawa serta anak-anak mereka. Kadang-kadang mereka meninggalkan kampung untuk suatu musim tertentu, misalnya musim tanam, dan baru kembali lagi ke desa asal setelah musim itu berlalu.

Pola perpindahan penduduk di atas memberikan dampak terhadap pendidikan anak-anak dari penduduk tersebut, baik mereka yang menetap pada kantong-kantong pemukiman yang kecil maupun anak-anak yang ikut orang tuanya berpindah secara musiman. Sering terjadi anak yang semula bersekolah di desa pangkalan (tempat tinggalnya) kemudian meninggalkan sekolah untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan musim perpindahan orang tua mereka. Oleh karena tempat yang baru tidak memiliki fasilitas sekolah, maka mereka tidak bersekolah selama itu. Hal ini terulang dari tahun ke tahun, sementara anak semakin besar dan akhirnya memutuskan untuk tidak bersekolah. Mereka malu terhadap teman-teman sekelasnya yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah secara kontinu.

Hal lain yang menarik perhatian adalah sejumlah guru yang menetap di kota Kuala Kapuas tetapi mengajar di pemukiman-pemukiman tidak tetap (karena kadang-kadang penghuninya banyak dan kadang-kadang sedikit sekali) dalam suatu radius sekitar 40 kilometer. Guru-guru ini berangkat dengan kapal motor kecil pada waktu pagi sekali dan pulang kembali ke Kuala Kapuas setelah mengajar pada siang hari. Ketika ditanya, mengapa mereka memilih pulang-pergi setiap hari dari Kuala Kapuas ke tempat tugas mereka, mereka menyatakan bahwa hal ini lebih baik daripada menetap di pemukiman yang pada satu saat bisa sunyi karena tidak berpenghuni.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, Kalimantan Tengah menghadapi persoalan tentang rendahnya tingkat pendidikan. Angka penduduk tidak tamat SD mencapai 23,60 persen, dan yang berpendidikan SD mencapai 35,12 persen. Penduduk yang berpendidikan SMP 18,96 persen, SMA 15,83 persen, SMK 1,29 persen, D1 sebanyak 1,12 persen, D3 0,92 persen, S1 3 persen, S2 dan S3 0,17 Persen.

Dalam rangka penuntasan wajib belajar sekolah dasar, pemerintah daerah membuat rencana aksi Murung Raya Cerdas tahun 2013. Program guru kunjung dipakai sebagai alternatif pelayanan pendidikan sekolah dasar terpencil yang dapat menjangkau anak usia sekolah 7-12 tahun secara menyeluruh. Program ini diarahkan untuk penuntasan wajib belajar di Kabupaten Murung Raya.

Sistem guru kunjung tidak mengharuskan guru menetap di lokasi pemukiman anak didiknya, tetapi ia tetap berkewajiban untuk memberikan pendidikan dengan berkunjung secara tetap dan teratur menjumpai

anak didiknya. Siswa yang dilayani biasanya berjumlah kurang dari 100 orang bahkan ada yang berjumlah kurang dari 30 orang untuk semua jenjang kelas. Para pejabat pendidikan merasa tidak tepat untuk menugaskan guru dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah jenjang kelas. Tidak, jarang seorang guru secara serempak melayani 6 kelompok anak yang mewakili semua jenjang kelas dan masing-masing kelompok mungkin hanya beranggotakan kurang dari 5 orang. Tentu saja guru tidak mungkin menggunakan pendekatan pengajaran klasikal konvensional. Guru harus melaksanakan proses pembelajaran dengan model yang disebut sebagai pengajaran merangkap kelas.

Pengajaran merangkap kelas merupakan suatu cara penyampaian yang harus dikuasai oleh guru agar dapat melayani semua anak dari semua tingkat kelas. Di samping itu anak-anak belajar secara mandiri atau terprogram. Dengan demikian, anak-anak di sekolah-sekolah sedemikian ini sebenarnya sudah lebih dulu melaksanakan cara belajar siswa aktif. Tentu saja belajar mandiri yang mungkin sangat berbeda dengan yang dikembangkan oleh Balitbang Kemendikbud.

Berdasarkan hasil penelitian Balitbang Depdikbud dan Kanwil Depdikbud Kalimantan Tengah 1986/1987 masih banyak terdapat penduduk, yang tinggal dikantong-kantong pemukiman daerah terpencil di Kalimantan Tengah, masyarakat yang tinggal menetap maupun yang berpindah-pindah. Pelayanan pendidikan sampai saat ini belum sepenuhnya mencapai kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

Model SD kecil yang telah dikembangkan untuk mengatasi pendidikan di daerah terpencil ternyata belum sepenuhnya dapat menjangkau anak-anak tersebut. Dengan berbagai alasan, pendirian SD Kecil di daerah kantong pemukiman terpencil juga tidak efisien (Depdikbud, 1989). Untuk itu dikembangkan suatu alternatif pemerataan pendidikan dasar yang dapat menjangkau serta melayani pendidikan dasar bagi anak-anak yang tinggal di kantong-kantong pemukiman daerah terpencil baik yang menetap maupun yang berpindah-pindah. Alternatif tersebut adalah model sistem guru kunjung. Penelitian ini terfokus pada perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan *stakeholder* yang terlibat dalam sistem guru kunjung.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di SD Kunjung Kecamatan Tanah Siang, SD Kunjung Kecamatan Sumber Barito, dan SD Kunjung Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menelaah dan mengungkap fokus penelitian yang berkaitan dengan

pelaksanaan model sistem guru kunjung pada daerah terpencil kawasan daratan.

Adapun rancangan penelitian yang digunakan adalah multi situs, sebab peneliti meneliti tiga subjek yang memiliki latar tempat yang sama. Dipilihnya studi multisitus karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan model sistem guru kunjung secara rinci dan menyeluruh dari tiga subjek penelitian pada latar alami dengan karakteristik yang sama. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil temuan di lapangan (Moleong, 2000; Sugiyono, 2006).

Sumber data penelitian ini adalah guru kunjung, siswa, pejabat yang kantor wilayah Kabupaten Murung Raya dan Kandepdikbudcam, Kepala Desa, tokoh adat, Kepala Sekolah SDN Induk, Penilik TK SD, guru SD, tutor dan tenaga terampil dari masyarakat yang dianggap tahu tentang ketiga SD Kunjung tersebut. Penentuan pihak-pihak tersebut sebagai sumber data diakukan secara *purposive* dan *snowball*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Analisis dilakukan melalui kegiatan mengorganisasi data, menata dan membagi data dalam unit-unit yang dapat dikelola, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti untuk diputuskan dan dilaporkan dengan sistematis (Bogdan & Biklen, 1998). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis data tiap situs dan analisis data lintas situs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan SD Kunjung berawal dari kesepakatan lokasi tanah, data guru dan tutor, dan informasi masyarakat tentang data anak yang belum bersekolah usia 7-12 tahun yang disampaikan kepada SD Induk. Perencanaan pendirian SD Kunjung dilakukan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat, perusahaan, kepala SD Induk dan guru, komite, Kades, dan Kepala UPTD. Penyusunan proposal dan mengumpulkan data siswa dibantu oleh masyarakat, perusahaan, kepala SD Induk, Kades dan tokoh masyarakat untuk mendapat dukungan doa restu dan hibah kios belajar.

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama, dan merupakan fungsi yang paling mendasar dari semua fungsi manajemen. Perencanaan dapat dimaknai sebagai proses yang berkesinambungan yang berupa kegiatan-kegiatan diagnose, pengumpulan data, perumusan masalah, perumusan kebutuhan, peninjauan

dan pemilihan sumber daya, penentuan faktor-faktor penunjang dan penghambat, alternatif pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pembuatan jadwal kegiatan, monitoring, umpan balik dan evaluasi (Syaefudin & Syamsudin, 2005). Perencanaan SD Kunjung telah meliputi sebagian dari proses perencanaan tersebut.

Sosialisasi penyelenggaraan SD Kunjung dilakukan atas inisiatif dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan oleh masyarakat, perusahaan, kepala SD Induk, Kades dan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari para tokoh masyarakat yang disampaikan dalam rapat adat Dayak kepada warga masyarakat sekitar. Sosialisasi dilakukan dengan secara lisan dan tertulis. Pihak yang melaksanakan sosialisasi adalah masyarakat, perusahaan, kepala SD Induk, Kades dan tokoh masyarakat setempat. Sasaran sosialisasi adalah semua warga masyarakat khususnya orang tua dan siswa. Hasil dari kegiatan sosialisasi adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan dan adanya SD Kunjung untuk mencapai pemerataan kesempatan pendidikan dasar daerah terpencil yang dengan hambatan geografis dan sosial ekonomi.

Sosialisasi penyelenggaraan SD Kunjung tersebut merupakan sosialisasi kebijakan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron (2008) bahwa sosialisasi merupakan pengkomunikasian rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasi. Selanjutnya, Yunus (2006) mengatakan bahwa aktivitas sosialisasi atau komunikasi merupakan suatu penjelasan substansi dari kebijakan ke dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah untuk dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat sebagai yang terkena dampak dari sebuah kebijakan.

Sosialisasi guru kunjung membuat masyarakat sadar tentang pentingnya pendidikan. Menurut Usman (2004), salah satu tujuan sosialisasi adalah merubah perilaku (pola pikir, perasaan dan tindakan) melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, koordinasi dan pengawasan.

Model pelaksanaan sistem guru kunjung di daerah terpencil kawasan daratan secara garis besar tercermin pada Gambar 1.

Program A1 dan A2 adalah anak usia sekolah 7-12 tahun/usia SD. A1 adalah kelas I, II, III. Dan A2 adalah kelas IV, V, VI. Mereka akhirnya mengikuti UAN SD. Program B1 dan B2 adalah anak di luar usia sekolah SD. Tamatnya memiliki umur 15 tahun. Mereka mengikuti UPER SD (Ujian Persamaan SD) dengan melayani anak putus sekolah B1 setara Kelas I-III SD, B2 setara kelas IV-VI SD.

Dalam model ini, ukuran untuk menilai keberhasilan program guru kunjung adalah standar nasional

pendidikan. Pengukuran dilakukan dengan ujian nasional atau ujian persamaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prysor-Jones (1980). Dia berpendapat bahwa keterampilan komunikasi, membaca, berhitung dan menulis didasarkan pada standar nasional minimal. Mereka yang telah lulus ujian tersebut diberi ijazah. Ijazah adalah tanda bukti keberhasilan belajar (Cowell, 1977).

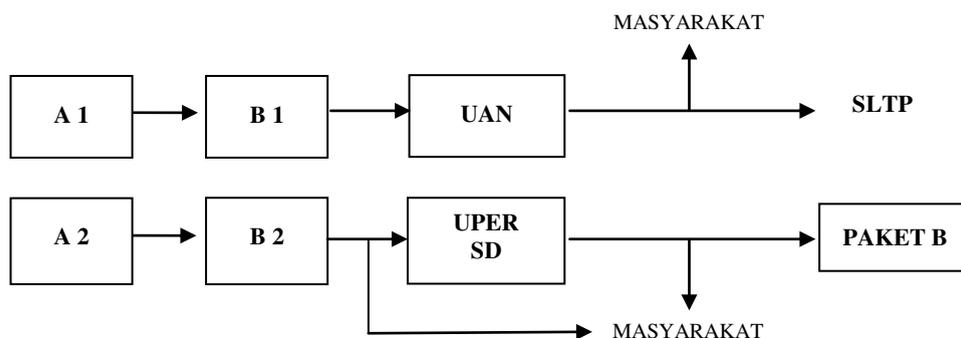
Latar belakang siswa adalah anak petani karet, petani rotan, atau buruh tambang perusahaan. Mereka berusia 7 sampai 12 tahun. Guru Kunjung memiliki kewenangan yang bervariasi (termasuk tenaga terampil dan totur). Mereka memberi kesempatan siswa belajar sendiri.

Fasilitas belajar berupa kios belajar atau bangsal. Sumber dana berasal dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan proyek. Bantuan perusahaan dipakai untuk mencetak modul. Bahan belajar diberikan dalam kelompok kecil atau individual. Bahan tersebut disajikan oleh guru kunjung dalam bentuk modul untuk belajar sendiri.

Jadwal ditentukan oleh kepala sekolah SD induk secara luwes dengan memperhatikan kondisi siswa. Waktu pelaksanaan bergilir. Kegiatan dilakukan di tempat yang tersedia fasilitas. Pengawasan dilakukan oleh Kepala SD Induk-Basis, guru kunjung, tenaga terampil dan totur. Pedoman dan prosedur penilaian ditentukan dari pusat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya. Ulangan disusun oleh guru kunjung berdasarkan kemajuan kelompok. Pencapaian belajar dapat dilihat dari hasil ujian sekolah tahun pelajaran 2010/2011 dengan nilai rata-rata 7,52.

Para *stakeholders* berperan sesuai dengan porsi-porsinya. Orang tua mempunyai kesadaran dan mendorong anaknya agar mau bersekolah. Masyarakat dan perusahaan di sekitarnya berperanserta dalam pembangunan gedung. Masyarakat bergotong royong menyumbangkan tenaga. Kesepakatan upah di bawah standar sebagai wujud kepedulian masyarakat untuk SD Kunjung. Kepala SD Induk dan guru kunjung pengkoordinir kegiatan-kegiatan di SD Kunjung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten berperan sebagai konsultan SD.

Peran *stakeholders* tersebut sesuai dengan pendapat Sutisna (1993). Ia mengemukakan bahwa maksud hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah, mempersatukan orang tua siswa dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah, dan mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.



Gambar 1. Model Sistem Guru Kunjung

SIMPULAN

Perencanaan pendirian SD Kunjung telah sesuai dengan persyaratan daerah terpencil, terisolasi, dan terpencar. Perencanaan juga memperhatikan hambatan geografis, sosial, dan ekonomi. Perencanaan juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat, dan melibatkan berbagai pihak.

Sosialisasi dilakukan oleh masyarakat, perusahaan, perangkat desa, kepala SD induk-basis, guru dan komite pada acara adat Dayak. Sosialisasi bertujuan untuk memotivasi masyarakat tentang pentingnya pen-

didikan untuk penguatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan SD kunjung dikepalai oleh seorang Kepala SD Induk yang berasal dari SD terdekat. Pelaksanaan tugas dibantu oleh guru, tutor atau tenaga terampil, penggunaan kios belajar atau bangsal, guru kunjung dan karyawan perusahaan. Pemerintah desa, perusahaan, tokoh adat dan masyarakat melaksanakan pembangunan kios belajar atau bangsal dengan melibatkan berbagai pihak. *Stakeholders* dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil telah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Adler, M.J. 1982. *The Paideia Proposal: An Educational Manifesto*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Balitbang Depdikbud. 1986. *Laporan Penelitian Kalimantan Tengah*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Jakarta:Balitbang Dikbud.
- Beeby, C.E. 1979. *Assessment of Indonesian Education: A Guide in Planning*. Wellington: Oxford University.
- Biro Pusat Statistik. 2010. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K., 1998. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. London: Allyn and Bacon, Inc.
- Cowell, F.A. 1977. *Measuring Equality: London School of Economics and Political Science I*. London: Philip Allen Publiser Ltd.
- Depdikbud. 1989. *Laporan Hasil Model Sistem Guru Kunjung*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Kalimantan Tengah: Depdikbud.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Tengah. 1991. *Laporan Penuntasan Wajib Belajar Tingkat Sekolah Dasar di Daerah Terpencil, Masyarakat Terasing, dan Masyarakat Nomadik/Perahu (Sebuah Alternatif) Kalimantan Tengah*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan. Palangka Raya: Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, 2010.
- Imron, A. 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa depannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Prysor-Jones, N. 1990. *Refocusing Educational Psychology*. London: The Falmer Press.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. & Tilaar, H.A.R. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Sutisna, O. 1993. *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoretis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Syaefudin, S.U. & Syamsudin, M.A. 2005. *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rodakarja.
- Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Usman, H. 2004. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana.
- Yunus, M. 2006. *Kebijakan Kemitraan Pendidikan Kejuruan*. Malang: Pustaka Kayutangan.